BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Bali merupakan Provinsi yang terkenal dengan adat istiadatnya dan aturan adat istiadat tersebut diatur dalam Desa Adat, tentunya mempunyai hak otonom untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi, termasuk didalamnya mengatur mengenai pengelolaan kekayaan Desa. Dalam hal ini, salah satu lembaga keuangan yang dimiliki masyarakat tingkat desa adalah LPD. LPD di Bali mulai berkembang sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali No. 972 tahun 1984. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang LPD, bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan Desa adat dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha dalam memperkuat keuangan Desa, sebagai sarana penunjang melalui pendirian suatu badan usaha milik desa berupa LPD yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.

LPD sebagai Lembaga Keuangan Desa bergerak dalam usaha simpan pinjam, dimana produk jasa yang ditawarkan oleh LPD dalam usahanya yaitu melalui tabungan, deposito dan pinjaman dari masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit yang efektif. LPD menyediakan pelayanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat Desa termasuk penduduk miskin. Sedangkan dari segi pelayanan yang dilakukan oleh LPD sesuai dengan

kebutuhan nasabah, yaitu prosedur yang sederhana, proses yang singkat, pendekatan personal, serta kedekatan lokasi dengan nasabah menjadi faktor keberhasilan LPD dalam menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat Desa, sehingga masyarakat mempunyai rasa aman dalam menyimpan dan meminjam uang pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kedekatan budaya dan psikologi dengan nasabah, serta karakter bisnis yang luwes merupakan kekuatan dan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja LPD sebagai lembaga keuangan mikro serta dalam bertahan dan berdaya saing terhadap lembaga keuangan yang sejenis. LPD juga memiliki peran yang sangat banyak untuk kepentingan masyarakat, dimana LPD membuat program yang dapat melestarikan budaya Bali, salah satu contohnya adalah LPD membuat program pengabenan masal dan metatah masal, Adapun tujuan LPD memprogram kegiatan tersebut tidak hanya untuk melestarikan budaya saja namun untuk meringankan beban dari masyarakat sehingga masyarakat bisa merasakan adanya keberadaan dan manfaat dari LPD yang ada di daerahnya (Balipost, 2019). Dalam menjalankan oprasionalnya LPD juga wajib membuat laporan keuangan secara akuntabel dan transparan yang dilakukan setiap bulannya. Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas selama periode satu tahun berjalan.

Menilai dari suatu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diperlukan laporan keuangan yang baik dan lengkap. Keberhasilan manajemen dalam mengelola suatu entitas atau organisasi dapat tercermin dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu lembaga

keuangan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban aktivitas perekonomian yang telah berlangsung dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh kualitas SDM yang berkompeten di dalam pengelolaan keuangan. SDM diharuskan memiliki pemahaman yang cukup terkait akuntansi sehingga dalam pembuatan laporan keuangan, laporan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik (Riastika, 2019). Namun hasil observasi awal yang dilakukan peneliti dengan Bapak Dewa Putu Widianara S.E selaku Wakil Koordinator LPLPD di Kabupaten Jembrana, dikatakan bahwa terjadi beberapa permasalahan pada laporan keuangan LPD Kabupaten Jembrana. Adapun permasalahan tersebut diantaranya beberapa LPD terlambatnya dalam pengumpulan laporan keuangan dan terdapat laporan keuangan yang tidak *balance*, (wawancara, 18 April 2022). Hal itu terjadi dikarenakan SDM masih belum memahami akuntansi dan tidak semua yang menyusun laporan keuangan memiliki riwayat pendidikan yang formal di bidang akuntansi, selain itu, hal tersebut juga terjadi karena tidak serentaknya penggunaan sistem informasi akuntansi dikarenakan kemampuan biaya LPD yang bervariasi, serta pelatihan yang dilakukan pihak LPLPD belum optimal dikarenakan pihak LPLPD Kabupaten Jembrana hanya melakukan pelatihan 1 tahun sekali sehingga laporan keuangan yang dihasilkan belum memiliki kualitas yang baik sehingga dari fenomena tersebut masyarakat menganggap bahwa pihak LPD tidak transparan dalam membuat laporan keuangan. Dari permasalahan yang muncul, pihak LPLPD telah berupaya meminimalisir hal tersebut baik dari penerimaan pegawai yang menggunakan persyaratan tertentu, memberikan bantuan kepada LPD yang memiliki kendala

biaya dalam penggunaan sistem informasi akuntansi, serta melakukan pelatihan rutin di setiap kecamatan.

Pemilihan Kabupaten Jembrana sebagai lokasi penelitian didasari dengan data yang didapatkan pada Lembaga Pemerdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali Tahun 2017, meskipun Kabupaten Badung menduduki tingkat persentase LPD tidak sehat paling tinggi dari pada Kabupaten lainnya, namun Kabupaten Jembrana juga memiliki tingkat persentase LPD tidak sehat yang tinggi juga dengan presentase 8%. Hal ini disebabkan karena pendapatan oprasional di Kabupaten Jembrana paling sedikit dibandingkan Kabupaten lain yaitu sebesar Rp. 88 juta sedangkan Kabupaten Badung sebesar Rp. 735 juta, Kabupaten Gianyar sebesar Rp. 555 juta, Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 276 juta, Kabupaten Tabanan sebesar Rp. 215 juta, Kabupaten Karangasem sebesar Rp. 176 juta, Kabupaten Bangli sebesar Rp. 132 juta dan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 113 juta (Bali.com, 2019)

Tabel 1.1
Persentase LPD Tidak Sehat di Bali

Kabupaten	Persentase
Badung	10%
Jembrana	8%
Gianyar	7%
Buleleng	5%
Bangli	4%
Klungkung	2%
Tabanan	1%
Karangasem	1%
Denpasar	0%

Sumber: LPLPD Provinsi Bali, 2017

Menurut data yang diperoleh dari LPLPD Kabupaten Jembrana Tahun 2022 terdapat 64 LPD yang tersebar di Kabupaten Jembrana yang terbagi menjadi

5 Kecamatan, berikut merupakan tabel jumlah LPD dan data kesehatan LPD yang ada di Kabupaten Jembrana.

Table 1.2
Jumlah LPD dan Data Kesehatan LPD Di Kabupaten Jembrana

No	Nama Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan				
			Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Tidak Operasi
1	Kecamatan Mendoyo	19	14	-	6	1	
2	Kecamatan Pekutatan	13	10	2	1	-	
3	Kecamatan Melaya	13	12	3	1	-	1
4	Kecamatan Negara	10	6	3	-	1	
5	Kecamatan Jembrana	9	7	-	-	2	
Jumlah		64	43	8	8	4	1

Sumber: LPLPD Kabupaten Jembrana, 2022

Dilihat dari tabel diatas dari 64 LPD yang terdaftar di seluruh Kecamatan Jembrana, terdapat 43 LPD dengan kategori sehat, 8 LPD dengan kategori cukup sehat, 8 LPD dengan kategori kurang sehat, 4 dengan kategori tidak sehat, dan 1 LPD yang tidak beroperasi. Meskipun memiliki tingkat LPD tidak sehat yang tinggi, LPLPD Kabupaten Jembrana berupaya agar laporan keuangan yang dihasilkan di setiap LPD tetap memiliki kualitas yang baik. Adapun karakteristik dari laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik diantaranya : 1. Dapat dipahami, yang berarti dapat dengan mudah dipahami oleh pemakai, 2. Relevan, yang berarti informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan, 3. Andal, yang berarti bebas dari laporan yang menyesatkan atau bebas dari kesalahan material dan penyajiannya harus jujur atas data yang seharusnya disajikan, 4. Dapat dibandingkan, yang berarti laporan

keuangan dapat dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan, ada beberapa aspek yang harus di perhatikan salah satunya adalah aspek yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya yaitu pemahaman terhadap akuntansi. seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan (KBBI, 2021). Pemahaman merupakan suatu proses panjang dan bersifat individual. Pemahaman seseorang antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama secara keseluruhan. Sebab, dalam memahami sesuatu seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu dan kemampuannya (Nova, 2015). Dengan tingkat pemahaman yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Variabel ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Dewi, 2020) dengan judul pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan mendapatkan hasil yaitu penelitian menyatakan bahwa pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain pemahaman terhadap akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi

keuangan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Sari et al., 2014). Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisir formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan (Puteri et al., 2019). Variabel ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hamen, 2018) dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, mendapatkan hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sejalan dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi, diperlukan juga pelatihan. Tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif (Irawati, 2018). Dalam pengembangan program pelatihan, diperlukan tahapan atau langkah – langkah yang sistematis sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan. Begitu pula dengan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, pelatihan sangat penting diterapkan untuk mengembangkan keterampilan karyawan dalam menerapkan standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Variabel ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adiputra et al., 2017) dengan judul Pengaruh

Pemahaman Akuntansi Berbasis SAK-ETAP, Kualitas Pelatihan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Laporan Keuangan Koperasi menyatakan bahwa kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari variabel yang telah dijelaskan diatas, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan, dimana teori keagenan merupakan teori yang dalam perakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara agen dan principal, dalam organisasi untuk meminimalisir konflik, maka laporan keuangan adalah salah satu hal yang dapat meminimalkan konflik antara pemerintah dan masyarakat luas (Listiani, 2018). Dapat juga di sebutkan bahwa teori *agency* merupakan teori yang menghubungkan antara *agent* dan *principal*, dalam hal ini *agent* memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *principal* yang memiliki hak untuk menerima/meminta pertanggungjawaban. Hubungan teori ini dengan variabel yang pertama yaitu pemahaman akuntansi. Paham akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi sehingga dengan tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan pemahaman akuntansi yang tinggi maka pihak *agent* dapat memberikan mempertanggungjawabkan kepada *principal* berupa laporan keuangan yang berkualitas. Hubungan variabel yang ke dua dengan teori ini adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan, dan pemerosesan aktivitas keuangan ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya digunakan oleh pihak *agent* maupun pihak *principal* untuk mengambil keputusan (Sari et al., 2014). Hubungan variabel yang ke tiga yaitu kualitas pelatihan.

Tujuan pelatihan adalah untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif (Irawati, 2018). Dengan kualitas pelatihan yang baik maka pihak *agent* lebih cepat dan efektif dalam memberikan pertanggungjawaban yang dibutuhkan oleh pihak *principal*. Hubungan variabel yang terakhir dengan teori yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak *agent* berkualitas maka kewajiban terhadap *principal* dapat terpenuhi dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Puteri et al., 2019), meneliti mengenai pengaruh pemahaman akuntansi dan pemanfaatan informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang menyatakan bahwa hasil penelitian pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian (Diani, 2015) yang meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, mendapatkan hasil penelitian bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta penelitian (Permatasari, 2019) yang meneliti tentang Pengaruh Kualitas Pelatihan Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM yang menyatakan bahwa kualitas pelatihan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dari ketidak konsistenan variabel yang digunakan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait variabel tersebut.

Penelitian ini berpedoman pada penelitian (Indrawan, 2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Indrawan, 2021) adalah pada objek penelitian

yang dijadikan tempat penelitian, yaitu (Indrawan, 2021) melakukan penelitian yang memfokuskan pada kualitas laporan keuangan BUMDes Se- Kabupaten Jembrana sedangkan penelitian ini dilakukan di LPD yang lebih mengkaji pada kualitas laporan keuangan LPD se-Kabupaten Jembrana. Selain itu perbedaan penelitian ini yaitu ingin memperluas penelitian sebelumnya dari (Indrawan, 2021) dengan judul Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BUMDes se – Kabupaten Jembrana, dengan mengganti variabel bebas (X3) yaitu Kualitas Pelatihan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD. Alasan mengganti variabel pengawasan internal dikarenakan dari hasil penelitian terdahulu variabel tersebut sudah konsisten dan positif mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dirasa tidak perlu lagi meneliti kembali. Sedangkan pemilihan variabel kualitas pelatihan ini didasari pada permasalahan yang terjadi di LPD se - Kabupaten Jembrana dan ketidak konsistenan penelitian terdahulu, berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan Dewa Putu Widiantara S.E selaku Wakil Kordinator LPLPD di Kabupaten Jembrana, dimana diutarakan bahwa pelatihan yang dilakukan belum optimal karena pelatihan hanya baru dilaksanakan 1 tahun sekali menyebabkan kualitas pelatihan yang dilakukan menjadi tidak optimal.

Berdasarkan latar belakang diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Kualitas Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD Se- Kabupaten Jembrana”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan seperti laporan keuangan yang tidak balance dan keterlambatan pengumpulan laporan keuangan dikarenakan masih banyak pengurus LPD di Kabupaten Jembrana yang belum memahami bidang akuntansi.
2. Tidak serentaknya penggunaan sistem informasi akuntansi yang digunakan pada LPD se-Kabupaten Jembrana, dikarenakan kemampuan biaya LPD bervariasi.
3. Kurang optimalnya pelatihan dari LPLPD Kabupaten Jembrana yang hanya dilakukan 1 tahun sekali.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memperkecil ruang lingkup penelitian agar tidak meluas dan menyimpang dari tujuan yang diinginkan maka dari itu penelitian ini akan berfokus pada pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan LPD se- Kabupaten Jembrana.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD se-Kabupaten Jembrana?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD Se- Kabupaten Jembrana?
3. Apakah kualitas pelatihan mempengaruhi kualitas laporan keuangan LPD se – Kabupaten Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji adanya pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Jembrana.
2. Untuk menguji adanya pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se-Kabupaten Jembrana.
3. Untuk menguji adanya pengaruh kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD se- Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi serta wawasan yang jelas mengenai akuntansi khususnya

pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian meneliti dan menulis serta mengembangkan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan.

b. Bagi LPLPD

Penelitian ini dapat digunakan dalam mengembangkan LPD kedepannya, terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

c. Bagi Undiksha

Sebagai bahan referensi untuk memperbaiki dan memperbarui penelitian-penelitian selanjutnya sehingga kualitas penelitian mahasiswa Undiksha dapat ditingkatkan.

d. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan LPD.